



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

PERIODE MEI

- BIDANG ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI
- BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
- BIDANG KELEMBAGAAN

**Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**  
Gedung Graha Mental Spritual Lantai 7  
Jl. Awaludin II No.1 Tanah Abang Jakarta Pusat

# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar**

**Kinerja Mei 2023**

**Bab I : Pendahuluan**

**Bab II : Akuntabilitas Kinerja**

- 1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (P.S.I)**
- 2. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (A.S.E)**
- 3. Bidang Kelembagaan**
  - A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.**
  - B. Bentuk Kegiatan.**
    - Uraian Kegiatan dan Ouputnya**

**Bab III : Penutup**

**Lampiran**

- Pemberitaan Media**
  - Infografis**
-

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tetap dapat melayani Publik Jakarta dengan komitmen dan pelayanan yang berkesinambungan. Pada situasi saat ini kesehatan menjadi sangat penting dan sebagai umat-Nya kita harus semakin dekat dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan mencegah terjadinya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP-DKI) dalam menjalankan kegiatannya berbasis pada perencanaan di 3 (Tiga) Bidang yakni Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE), Bidang Kelembagaan. Ketiga bidang ini penting dan saling mendukung dan sinergi satu sama lain.

Laporan Kinerja Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP-DKI) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Informasin Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang dimanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Puiblik dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang standar layanan Informasi. Laporan ini ingin menjelaskan kinerja pada Bulan Januari 2023 serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya laporan periodik ini kami sangat berharap peran sekretariat dapat ditingkatkan sebagai penunjang secara konkrit dan bekesinambungan bagi rencana kegiatan atau program yang direncanakan Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Komunikasi aktif dan kehadiran Kepala Sekretariat menjadi sangat penting dalam hal berkoordinasi dan menunjang program yang direncanakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kiranya kerjasama yang baik dapat selalu ditingkatkan untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta.

Terima Kasih.

**Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**  
**KETUA**



**Harry Ara Hutabarat, S.H.,M.H**

---

# LEMBAR PENGESAHAN

---

## Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Harry Ara Hutabarat, S.H.,M.H

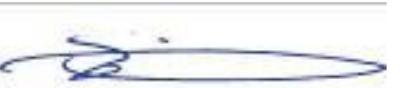
Ketua



( ..... )

Luqman Hakim Arifin, S.Fil

Wakil Ketua  
Ketua Bidang Kelembagaan



( ..... )

Aang Muhdi Gozali, Lc.,MA

Ketua Bidang Advokasi,  
Sosialisasi dan Edukasi



( ..... )

Agus Wijayanto Nugroho, S.H.,M.H

Ketua Bidang Penyelesaian  
Sengketa Informasi



( ..... )

---

## **BAB. I PENDAHULUAN**

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang berkedudukan di ibu kota Provinsi DKI Jakarta.

Tugas dari Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi publik di daerah melalui mediasi atau/dan ajudikasi nonlitigasi. (UU No. 14 Tahun 2008, Pasal: 26, ayat: 3).

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. memanggil dan / atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi publik; dan
- e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (UU No. 14 Tahun 2008, Pasal: 27, ayat 1 dan 3)

## **BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA BIDANG ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI (A.S.E)**

### **A. URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI.**

Adapun tugas dan fungsi Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

#### **A. Tugas**

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:

- 1) Advokasi
  - ◆ Mendorong implementasi dan regulasi UU KIP Nomor 14 Tahun 2008
  - ◆ Mengembangkan sistem manajemen layanan informasi
  - ◆ Meningkatkan image building keterbukaan informasi publik
- 2) Sosialisasi
  - ◆ Meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi publik kepada Badan Publik
  - ◆ Meningkatkan pemahaman keterbukaan informasi publik kepada Masyarakat
  - ◆ Membuat panduan sosialisasi UU KIP untuk Badan Publik dan Masyarakat
- 3) Edukasi
  - ◆ Penguatan Badan Publik dalam implementasi UU KIP
  - ◆ Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam informasi publik

#### **B. Fungsi**

Fungsi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, merupakan konsekuensi logis dari terbitnya Peraturan Komisi Informasi.

- ❖ Mendukung kinerja KI DKI Jakarta dalam penyelesaian sengketa informasi maupun penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi.
- ❖ Mengakselerasi pelaksanaan UU KIP di badan publik
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik

### **B. BENTUK KEGIATAN**

- 1) **Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik bagi jajaran internal Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.**



*Suasana Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik, Kamis (25/5/2023)*

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik, Kamis (25/05/2023).

Pelatihan advokasi kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus membekali kemampuan SDM internal dalam mengadvokasi kebijakan publik.

Komisioner KI DKI Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) Aang Muhdi Gozali mengatakan kemampuan advokasi sangat dibutuhkan dalam mendorong terciptanya kebijakan publik yang dapat memudahkan penerapan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi.

"Pelatihan ini menjadi kebutuhan bagi internal KI DKI. Melalui advokasi, Kita dapat mendorong kebijakan publik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan badan publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta," kata Aang.

Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan advokasi kebijakan publik merupakan upaya untuk mengubah kebijakan publik agar lebih adil dan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat..

Terdapat setidaknya tiga skema advokasi yang dapat dilakukan; Pertama, proses-proses legislasi dan yuridiksi, Kedua, proses-proses politik dan birokrasi dan Ketiga, proses-proses sosialisasi dan mobilisasi.

"Kerja-kerja advokasi itu dilakukan secara terencana, dan strategi pembagian kerjanya itu meliputi kerja pendukung (supporting units), kerja garis depan (front lines) dan kerja basis (ground atau underground work)," ujarnya.

Senada, Peneliti ICW yang juga Koordinator Divisi Kampanye Publik Tibiko Zabar Pradano menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam advokasi yaitu merumuskan masalah yang diadvokasi, merumuskan tujuan advokasi, merumuskan tawaran solusi, memetakan aktor, menyusun jalan kemenangan advokasi, dan menyusun pesan kunci advokasi.

"Setelah itu adalah memilah isu yaitu memotong permasalahan menjadi isu yang kecil-kecil agar lebih mudah dikampanyekan. Isu merupakan bagian dari masalah sekaligus solusi," ucap Biko sapaan akrabnya.

Tak kalah penting, lanjut Biko, dalam mengadvokasi harus juga melakukan pemetaan kekuatan. Tujuannya untuk mengetahui mana kekuatan-kekuatan yang dapat dimaksimalkan dalam mencapai tujuan advokasi.

Menurut Biko, advokasi pada prinsipnya sama dengan kampanye, yaitu cara untuk mendekatkan pesan advokasi organisasi ke publik. Advokasi juga bertujuan untuk menyampaikan dan menyatukan suara-suara yang tidak didengar.

Diketahui, Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik diikuti oleh Komisioner dan jajaran tenaga ahli KI DKI serta Sekretariat. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua sesi yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

## **2) Seminar Keterbukaan Informasi Publik kolaborasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta.**

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, beserta PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi menggelar seminar Keterbukaan Informasi Publik di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Selasa (30/05/2023).

Seminar KIP di UMJ ini mengambil tema "Kenali Hak Akses Informasi Publik di Jakarta".

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyampaikan dalam sambutannya, tata kelola pemerintahan yang baik dapat diciptakan melalui transparansi. Transparansi keterbukaan informasi publik misalnya menjadi kunci untuk menciptakan good governance yang demokratis.

"Mahasiswa sebagai agent of change diharap mampu menjadi inisiator. Melalui seminar ini, UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai landasan dalam memperoleh informasi publik. Maka, kami harap teman-teman mahasiswa turut berpartisipasi aktif dalam mengawal transparansi badan publik dengan landasan regulasi yang ada serta mensosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat," ujar dia.

Senada, Plt Kepala Diskominfo Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyampaikan sambutan melalui daring keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting di era transformasi digital. Individu dapat memperoleh hak informasi melalui PPID yang ada di badan publik.

Pada sesi diskusi, Komisioner KI DKI Bidang Edukasi Sosialisasi dan Advokasi (ESA) Aang Muhdi Gozali mendorong UMJ sebagai wadah bagi mahasiswa dan akademisi mengawal transparansi dengan adanya substansi UU No. 14 Tahun 2008.



“Tanpa peran partisipasi masyarakat, khususnya mahasiswa di bidang akademis transparansi dan good governance tidak dapat terlaksana.”

Komisioner KPU RI periode 2007-2012 yang juga merupakan akademisi menyampaikan pendapatnya mengenai keterbukaan informasi publik.

Hak dalam mengakses informasi telah sejak lama diperjuangkan, reformasi tahun 1998 misalnya menjadi pembuka gerbang keterbukaan informasi publik untuk masyarakat luas.

“Yang dimaksud dengan badan publik yaitu lembaga yang menggunakan dananya dari APBN, APBD, serta sumbangan negara dan lainnya. Termasuk NGO dan partai politik di dalamnya. Sehingga harus juga menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik, tak terkecuali dari segi anggaran.” Kata beliau.

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Asep Setiawan memaparkan materinya terkait keterbukaan informasi publik. Setidaknya ada tiga peranan mahasiswa dalam hal ini. Yang pertama, mahasiswa harus kritis. Adanya UU no. 14 Tahun 2008 juga harus turut diawasi implementasinya. Kedua, mahasiswa sebagai peneliti. Ketiga, mahasiswa dapat menjalankan pengabdian masyarakat.

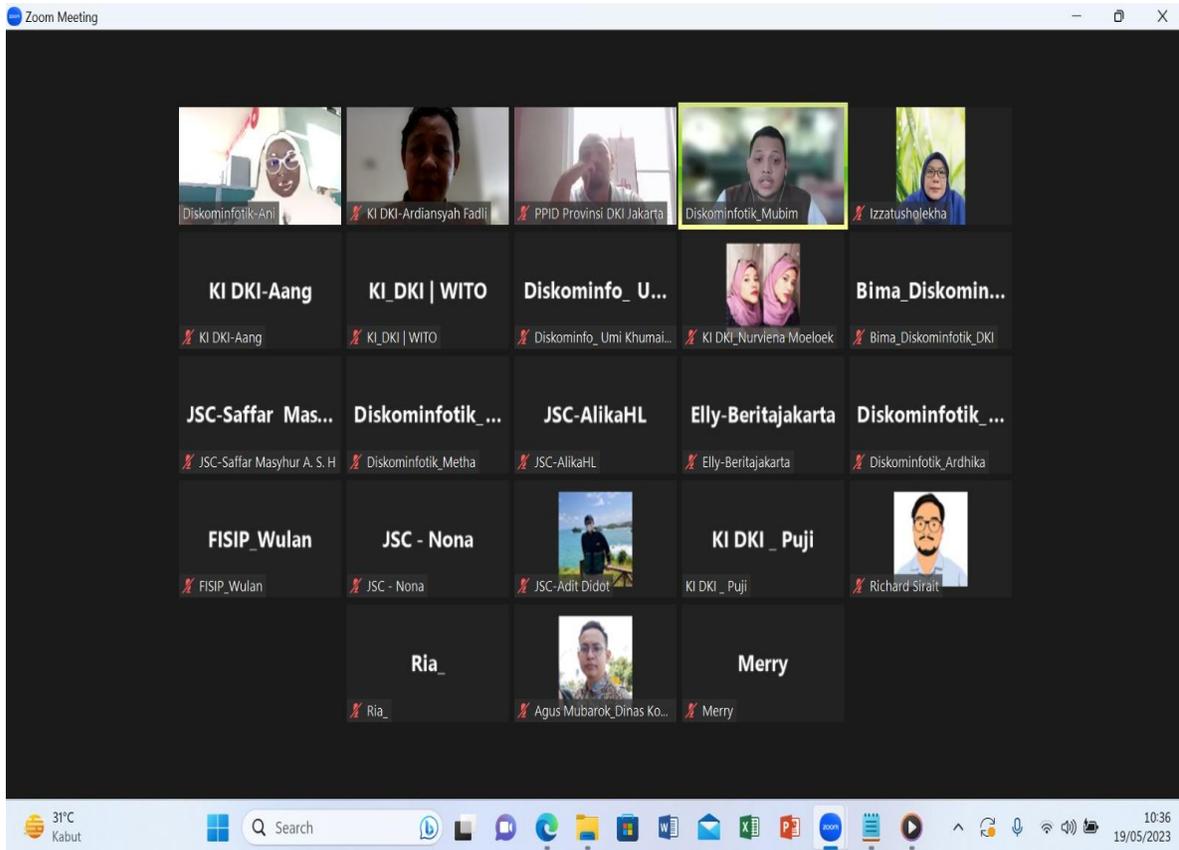
“Badan publik di Provinsi DKI Jakarta, pasti sudah terbiasa dengan kehadiran mahasiswanya di instansi untuk melakukan magang. Melalui magang ini juga bisa menjadi bentuk pengabdian masyarakat.” Ujarnya.

Diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber yaitu Komisioner Bidang ESA Aang Muhdi Gozali, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Asep Setiawan, MA., Komisioner KPU RI periode 2007-2012 Dr. Endang Sulastri, M.Si serta Moderator Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si.

### 3). Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik dengan ICW (Indonesian Corruption Watch ).

Rapat persiapan teknis pelatihan advokasi kebijakan publik bagi internal jajaran Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta secara daring pada Rabu, 3 Mei 2023. Dihadiri pihak ICW Agus Sunaryanto (Koordinator ICW ) dan Staff ICW Tibiko, Dari KI DKI Jakarta dihadiri Komisioner Aang Muhdi Gozali dan tenaga ahli. Rencananya pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga ahli dalam melakukan advokasi keterbukaan informasi publik.

### 4). Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan PPID Provinsi dan Univ. Muhammadiyah Jakarta Mengenai Persiapan Acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik.



*Rapat dilaksanakan secara daring dihadiri Komisioner Aang Muhdi Gozali dan Tenaga Ahli Bidang E.S.A, pada Jumat(19/5/2023)*

### 5). Melaksanakan Rapat Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi

Rapat rutin untuk koordinasi antara komisioner dan tenaga ahli bidang E.S.A di kantor Gedung Graha Mental Spiritual pada Kamis (11/5/2023) . dihadiri komisioner Aang Muhdi Gozali dan seluruh tenaga ahli. Mengagendakan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang akan dilaksanakan di bulan Mei.



*Rapat Bidang ESA, Kamis (11/5/2023)*

**6). Rapat koordinasi bersama JSC dan Berjakarta dengan KI DKI Jakarta.**

Rapat koordinasi bersama Jakarta Smart City, Berita Jakarta dan Komisi Informasi DKI Jakarta untuk rencana kegiatan sinergi seminar keterbukaan informasi publik di kampus-kampus pada Selasa, 16 Mei 2023. Rapat dihadiri Nelvia Gustina, SP (Wakil Ketua), Haris( Manager JSC), Elly( Manager Berita Jakarta) dan staff serta Tenaga Ahli Bidang E.S.A KI DKI Jakarta.



**7). Membuat Kreativitas content/infografis.**

**Kreativitas tersebut antara lain :**

- a. Mempublish seluruh kegiatan di media sosial KI DKI Jakarta
- b. Berita Photo kegiatan
- c. Sinergi dengan media online lainnya (*Berita Jakarta, Elshinta.com, Indopos.co.id, Sonora.id, Republika dan Antara News*)

**8). Optimalisasi upload/posting dokumentasi seluruh kegiatan di media sosial serta website KIP DKI. (terlampir).**

Akun media sosial Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang dikelola bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi yaitu liputan berita, berita photo, juga mengelola serta **mengisi konten** di website. Beberapa konten di dalamnya termasuk konten berita sidang dan putusan sidang, berita kunjungan/audiensi, infografis serta artikel yang menyangkut keterbukaan informasi.

- **Berita Photo setiap acara lembaga dan sidang sengketa informasi**
- **Website Komisi Informasi DKI Jakarta**

Beberapa konten website di dalamnya termasuk konten berita sidang, berita kunjungan, serta artikel yang menyangkut keterbukaan informasi. Berikut konten selama Mei 2023 yang dipublikasikan melalui website.

No	Tanggal Terbit	Link Berita	Judul Berita
1.	3 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/kembali-gelar-fgd-ki-dki-jakarta-kaji-manajemen-website-untuk-komunikasi-publik/">https://kip.jakarta.go.id/kembali-gelar-fgd-ki-dki-jakarta-kaji-manajemen-website-untuk-komunikasi-publik/</a>	kembali-gelar-fgd-ki-dki-jakarta-kaji-manajemen-website-untuk-komunikasi-publik
2.	9 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/bahas-hasil-indeks-kip-2023-pokja-dki-jakarta-tekanan-hasil-penilaian-tidak-di-rekayasa/">https://kip.jakarta.go.id/bahas-hasil-indeks-kip-2023-pokja-dki-jakarta-tekanan-hasil-penilaian-tidak-di-rekayasa/</a>	bahas-hasil-indeks-kip-2023-pokja-dki-jakarta-tekanan-hasil-penilaian-tidak-di-rekayasa.
3.	17 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/hari-keterbukaan-informasi-ki-dki-jakarta-ikuti-deklarasi-komitmen-kawal-pemilu-2024-yang-terbukainkusif-dan-informatif/">https://kip.jakarta.go.id/hari-keterbukaan-informasi-ki-dki-jakarta-ikuti-deklarasi-komitmen-kawal-pemilu-2024-yang-terbukainkusif-dan-informatif/</a>	hari-keterbukaan-informasi-ki-dki-jakarta-ikuti-deklarasi-komitmen-kawal-pemilu-2024-yang-terbuka inkusif-dan-informatif
4.	17 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/optimalisasi-layanan-informasi-publik-dinkes-dki-jakarta-berhasil-meraih-anugerah-tinarbuka-2023/">https://kip.jakarta.go.id/optimalisasi-layanan-informasi-publik-dinkes-dki-jakarta-berhasil-meraih-anugerah-tinarbuka-2023/</a>	optimalisasi-layanan-informasi-publik-dinkes-dki-jakarta-berhasil-meraih-anugerah-tinarbuka-2023
5.	24 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/gelar-sidang-kedua-antara-dinas-citata-dki-dan-akrin-media-majelis-komisioner-gali-alasan-permohonan-informasi/">https://kip.jakarta.go.id/gelar-sidang-kedua-antara-dinas-citata-dki-dan-akrin-media-majelis-komisioner-gali-alasan-permohonan-informasi/</a>	gelar-sidang-kedua-antara-dinas-citata-dki-dan-akrin-media-majelis-komisioner-gali-alasan-permohonan-informasi
6.	24 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/legal-standing-belum-terpenuhi-sidang-ajudikasi-antara-satpol-pp-pemprov-dki-jakarta-dan-pt-akrin-media-cemerlang-ditunda/">https://kip.jakarta.go.id/legal-standing-belum-terpenuhi-sidang-ajudikasi-antara-satpol-pp-pemprov-dki-jakarta-dan-pt-akrin-media-cemerlang-ditunda/</a>	legal-standing-belum-terpenuhi-sidang-ajudikasi-antara-satpol-pp-pemprov-dki-jakarta-dan-pt-akrin-media-cemerlang-ditunda
7.	24 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/sidang-sengketa-informasi-digelar-majelis-beri-waktu-termohon-bank-dki-lakukan-uji-konsekuensi/">https://kip.jakarta.go.id/sidang-sengketa-informasi-digelar-majelis-beri-waktu-termohon-bank-dki-lakukan-uji-konsekuensi/</a>	sidang-sengketa-informasi-digelar-majelis-beri-waktu-termohon-bank-dki-lakukan-uji-konsekuensi/

8.	26 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/gandeng-icw-ki-dki-gelar-pelatihan-advokasi-kebijakan-publik/">https://kip.jakarta.go.id/gandeng-icw-ki-dki-gelar-pelatihan-advokasi-kebijakan-publik/</a>	gandeng-icw-ki-dki-gelar-pelatihan-advokasi-kebijakan-publik.
9.	30 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/optimalisasi-e-monev-badan-publik-tahun-2023-ki-dki-jkt-gelar-focus-group-discussion/">https://kip.jakarta.go.id/optimalisasi-e-monev-badan-publik-tahun-2023-ki-dki-jkt-gelar-focus-group-discussion/</a>	optimalisasi-e-monev-badan-publik-tahun-2023-ki-dki-jkt-gelar-focus-group-discussion
10.	31 Mei 2023	<a href="https://kip.jakarta.go.id/majelis-komisioner-ki-dki-putus-sela-sengketa-informasi-pemohon-pt-akrin-media-cemerlang-ini-alasannya/">https://kip.jakarta.go.id/majelis-komisioner-ki-dki-putus-sela-sengketa-informasi-pemohon-pt-akrin-media-cemerlang-ini-alasannya/</a>	majelis-komisioner-ki-dki-putus-sela-sengketa-informasi-pemohon-pt-akrin-media-cemerlang-ini-alasannya

>> **Media Sosial Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.**

Website : [kip.jakarta.go.id](http://kip.jakarta.go.id)

Facebook : kip dki

Twitter : kipdki

Instagram : kipdkijakarta

Youtube : komisi informasi Provinsi DKI Jakarta

Email : [kip@jakarta.go.id](mailto:kip@jakarta.go.id) // [komiinformasidki@gmail.com](mailto:komiinformasidki@gmail.com)

## BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (PSI)

### A. URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Adapun tugas pokok dan fungsi bidang penyelesaian sengketa informasi sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008, antara lain :

1. Melaksanakan penyelesaian sengketa informasi melalui adjudikasi nonlitigasi dan atau mediasi
2. Melakukan kajian-kajian terhadap hasil dari putusan sengketa informasi
3. Membuat putusan -putusan sengketa informasi yang berkualitas.

### B. BENTUK KEGIATAN

Dalam hal penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi berpedoman kepada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Adjudikasi Non Litigasi dan Mediasi.

#### 1) Mediasi:

- Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela
- Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu:
  - Tidak disediakannya informasi berkala.
  - Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - Tidak dipenuhinya permintaan informasi
  - Pengenaan biaya yang tidak wajar;
  - Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini.
- Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi. (UU No. 14 tahun 2008, Pasal: 40)

#### 2) Adjudikasi Non Litigasi:

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

#### 1) Berikut agenda sidang sengketa informasi publik selama bulan April Tahun 2023:

- Sidang Adjudikasi Non Litigasi di bulan mei ada 4 register yang diproses dalam penyelesaian sengketa informasi.

No	No Sengketa	Majelis Komisioner	Agenda
1	Sidang adjudikasi no register0016/XII/KIP-DKI-PS/2022 antara pemohon PT. Akrin Media Cemerlang dengan termohon Satpol PP Prov. DKI Jakarta	Ketua Majelis : Agus Wijayanto Nugroho Anggota : Aang Muhdi Gozali Luqman Hakim Arifin Mediator : Nelvia Gustina Panitera: Melin Evalina Situmorang	pemeriksaan awal (legal standing).
2	Sidang adjudikasi no register 15/XI/KIP-DKI-PS/2022 antara pemohon PT. Akrin Media	Ketua Majelis : Harry Ara Hutabarat, S.H.,M.H	pemeriksaan awal (legal standing).

	Cemerlang dengan termohon Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	<p>Anggota :</p> <p>Agus Wijayanto Nugroho</p> <p>Luqman Hakim Arifin</p> <p>Mediator : Aang Muhdi Gozali</p> <p>Panitera: Elwin Rivo Sani</p>	
3	Sidang ajudikasi no register 0014/XII/KIP-DKI-PS/2022 antara pemohon NGO TOPAN RI dengan termohon Bank DKI KCU Balai kota Jakarta	<p>Ketua Majelis : Nelvia Gustina</p> <p>Anggota :</p> <p>Agus Wijayanto Nugroho,</p> <p>Harry Ara Hutabarat</p> <p>Mediator : Luqman Hakim Arifin</p> <p>Panitera: Melin Evalina Situmorang</p>	Sidang ke 3 pemeriksaan legal standing).
4	Sidang ajudikasi no.register 0015/XI/KIP-DKI-PS/2022 antara pemohon PT.Akrin Media Cemerlang (Surat Kabar Harapan Rakyat) dan Termohon Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	<p>Ketua Majelis : Harry Ara Hutabarat</p> <p>Anggota :</p> <p>Agus Wijayanto Nugroho</p> <p>Luqman Hakim Arifin</p> <p>Mediator : Aang Muhdi Gozali</p> <p>Panitera Pengganti : Elwin Rivo Sani.</p>	Agenda pembacaan putusan,

## 2) Dokumentasi Sidang Sengketa Informasi Publik.

Terlampir





**SIDANG SENGKETA INFORMASI**

Sidang ajudikasi No. register 0016/XII/KIP-DKI-PS/2022 antara pemohon, PT. Akrin Media Cemerlang (Surat Kabar Harapan Rakyat) dan termohon SATPOL PP Pemprov. DKI Jakarta dengan agenda Sidang Ajudikasi (Pemeriksaan Legal Standing) . Selasa (23/05/2023).

Ketua Majelis : Agus Wijayanto Nugroho, SH., MH  
 Anggota Majelis :  
 • Aang Muhdi Ghozali, Lc.,MA  
 • Luqman Hakim Arifin, S.Fil

Mediator : Nelvia Gustina, S.P  
 Panitera Pengganti : Melin Evalina Simatupang

kip dki / kipdki / kipdkijakarta / kip.jakarta.go.id / kip@jakarta.go.id





**SIDANG SENGKETA INFORMASI**

Sidang ajudikasi No. register 0014/XI/KIP-DKI-PS/2022 antara pemohon, Topan RI dan termohon Bank DKI KCU Balaikota Jakarta dengan agenda Sidang Ajudikasi Ke - III (Pemeriksaan Legal Standing) , Selasa (23/05/2023).

Ketua Majelis : Nelvia Gustina, S.P  
 Anggota Majelis :  
 • Harry Ara Hutabarat, SH.,MH  
 • Agus Wijayanto Nugroho, SH.,MH

Mediator : Luqman Hakim Arifin, S.Fil  
 Panitera Pengganti : Melin Evalina Simatupang

kip dki / kipdki / kipdkijakarta / kip.jakarta.go.id / kip@jakarta.go.id

#Hak Anda untuk tahu!




**SIDANG SENGKETA INFORMASI**

Sidang ajudikasi No. Register 0015/XI/KIP-DKI-PS/2022 antara pemohon, PT. Akrin Media Cemerlang (Surat Kabar Harapan Rakyat) dan termohon Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan agenda Pembacaan Putusan, Rabu (31/05/2023).

Ketua Majelis : Harry Ara Hutabarat, SH., M.H  
 Anggota Majelis :  
 • Agus Wijayanto Nugroho, SH., M.H  
 • Luqman Hakim Arifin, S.Fil

Mediator : Aang Muhdi Gozali, Lc., MA  
 Panitera Pengganti : Elwin Rivo Sani

kip dki / kipdki / kipdkijakarta / kip.jakarta.go.id / kip@jakarta.go.id

**JADWAL SIDANG**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

Rabu, 31 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB  
 Ruang Sidang Lantai 1, Gedung Graha Mental Spiritual

<b>No. Sengketa</b>	▶ 15/XI/KIP-DKI-PS/2022
<b>Pemohon</b>	▶ PT. Akrin Media Cemerlang (Surat Kabar Harapan Rakyat)
<b>Termohon</b>	▶ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Prov. DKI Jakarta
<b>Agenda Sidang</b>	▶ Pembacaan Putusan
<b>Permohonan Informasi</b>	▶ Adapun informasi dan dokumen yang dimohonkan: 1. Berapa jumlah bangunan yang ditemukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kota Adm Jakarta Barat yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menyalahi/melanggar IMB pada periode dari Januari 2022 sampai Juni 2022. 2. Pada periode Januari 2022 sampai Juni 2022, berapakah jumlah bangunan di Kota Adm Jakarta Barat yang diajukan Surat Peringatan (SP), Surat Segel, Surat Perintah Bongkar dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) IMB dan SLF dan diantaranya di lokasi dimana saja. 3. Berapakah jumlah dilakukan pelaksanaan penyidikan dan peneraan sanksi pidana atas pelanggaran bangunan di wilayah Kota Adm Jakarta Barat pada periode Januari 2022 sampai Juni 2022. 4. dll
<b>Ketua Majelis</b>	▶ Harry Ara Hutabarat
<b>Anggota Majelis</b>	▶ 1. Luqman Hakim Arifin 2. Agus Wijayanto Nugroho
<b>Mediator</b>	▶ Aang Muhdi Gozali
<b>Panitera Pengganti</b>	▶ Elwin Rivo Sani

#BukaInformasiPublik  
 #HakAndaUntukTahu

kip dki / kipdki / kipdkijakarta / kip.jakarta.go.id / kip@jakarta.go.id

## BIDANG KELEMBAGAAN

### A. URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELEMBAGAAN

Adapun tugas dan fungsi Bidang Kelembagaan, yaitu :

1. Terwujudnya Badan Publik yang dapat melakukan klasifikasi Informasi dan Penyediaan Informasi Publik
2. Mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik atau petugas yang khusus menangani Informasi Publik
3. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan *civil society* yang dalam keterbukaan informasi publik
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menjalin kerjasama dengan Lembaga Internasional

### B. BENTUK KEGIATAN.

**Kegiatan Bidang Kelembagaan, yaitu:**

#### 1) Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) IKIP bersama Komisi Informasi Pusat.

Guna memotret implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) di Wilayah DKI Jakarta, Komisi Informasi Pusat bersama kelompok kerja Daerah (Pokjada) Provinsi DKI Jakarta gelar FGD Indeks KIP di Hotel Milenium Jakarta Pusat, pada Senin (8/5/2023).

Pada kesempatan FGD, welcome speech oleh Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dan dibuka resmi Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro.

Focus Group Discussion (FGD) merupakan rangkaian pelaksanaan Indeks Tahun 2023 melibatkan kelompok kerja (Pokja) DKI Jakarta yang terdiri dari Ketua Pokja Nelvia Gustina, serta Anggota Pokja lainnya Agus Wijayanto Nugroho, Heri Herdiawanto, Angel Damayanti dan Elwin Rivo Sani.

Ketua Pokja DKI Jakarta Nelvia Gustina mengatakan penyusunan indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) di DKI Jakarta merupakan tahun ketiga untuk memotret implementasi keterbukaan informasi di DKI Jakarta.



*FGD IKIP 2023 bersama Pokja Daerah dan Informan Ahli, Senin (8/5/2023)*

Nelvi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota pokja dan informan ahli telah bekerja dengan sangat baik untuk mensukseskan IKIP 2023.

“Terima kasih kepada seluruh Anggota Pokja serta Informan Ahli telah bersama-sama mensukseskan Indeks KIP Provinsi DKI Jakarta,” ujar Nelvi dalam kesempatannya.

Selain itu, pengisian kuesioner dilakukan 9 Informan Ahli (IA) mewakili berbagai kalangan yang berpengalaman di bidang keterbukaan informasi baik melalui sektor ekonomi, hukum dan politik. Kesembilan Informan Ahli tersebut yakni Taufan Bakri (Badan Publik), Elisabeth Ratu Rante Allo (Badan Publik), Munandar Nugraha (Badan Publik), Anggawira (Pelaku Usaha), Titi Purwanti (Pelaku Usaha), Rachmawati Alida (Pelaku Usaha), Johny Nelson Simanjuntak (Praktisi), Ibrahim Zuhdi Badoh (Praktisi/Wakil Masyarakat), M. Imam Nasef (Akademisi).

Kehadiran informan ahli untuk memberikan masukan dan penilaian terkait sejauh mana keterbukaan informasi publik diterapkan secara objektif. Diharapkan dapat menggali, memperkaya dan mendiskusikan terkait implementasi KIP di DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Nelvi juga berharap FGD ini benar-benar dapat memotret keterbukaan informasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Serta dapat menjadi landasan kebijakan bagi stake holder untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik.

“Hasil kuesioner hari ini merupakan akhir dari pelaksanaan Pokja Indeks KIP DKI Jakarta. Tidak ada rekayasa karena Indeks KIP bukan pemeringkatan tapi pemotretan implementasi di tahun 2022. Harapannya, memberikan dampak peningkatan layanan informasi publik tidak hanya Masyarakat DKI Jakarta juga Bangsa Indonesia”, ucap Nelvia Gustina Ketua Pokja IKIP DKI Jakarta.

Perlu diketahui, Data IKIP 2022 Provinsi DKI Jakarta berada di urutan ke 11 dengan nilai 77,14. KI DKI Jakarta berharap dengan Indeks KIP dapat meningkat dan dibarengi dengan peningkatan indeks –indeks yang lain.

Selanjutnya, KI DKI Jakarta selaku Pokja atas hasil pelaksanaan FGD akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Informasi Pusat dan laporan sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Sukseskan IKIP DKI Jakarta 2023.

## **2) Menerima audiensi dari Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu.**

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi dari Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, yang diterima langsung Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, Wakil Ketua Luqman Hakim Arifin dan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Agus Wijayanto Nugroho dan Ketua Bidang E.S.A Aang Muhdi Gozali di kantor KI DKI Jakarta Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Selasa (9/5/2023)

Kunjungan tersebut membahas pengalaman Komisi Informasi di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus sharing mengenai strategi komunikasi yang dibangun antara KI dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dan Gubernur.

Diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Sarjoni Hanapi, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Faisal Mardianto dan jajaran Staf Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan KI DKI. Kata dia, kunjungan silaturahmi ini sekaligus ingin sharing dan mempelajari pengalaman Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta.

"Tentu Kami ingin mengetahui bagaimana dan apa saja pengalaman Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena ini Ibu Kota, sentral sehingga tentu memiliki tantangan yang kompleks, dan banyak informasi publik yang dikelola oleh badan publik," kata Sumardi.

Tak hanya itu, kata Sumardi, dalam pertemuan ini, pihaknya ingin mengetahui bagaimana sinergisitas, hubungan komunikasi yang dibangun antara KI DKI dengan Diskominfotik DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami mau mendengarkan paparan langsung dari Ketua KI DKI, bagaimana kerja samanya dengan Diskominfotik DKI Jakarta, dan Pak Gubernur," ucap dia.



### 3). Menghadiri Agenda Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN).

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil meraih Anugerah Tinarbuka 2023 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.

Hal tersebut, disampaikan Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dan Ketua Bidang Kelembgaan Luqman Hakim Arifin menghadiri kegiatan Anugerah Tinarbuka di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Rabu (17/5/2023).

Pencapaian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjaid momentum agar PPID di seluruh Badan Publik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan optimalisasi layanan informasi publik.

Hal tersebut, disampaikan Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dan Ketua Bidang Kelembgaan Luqman Hakim Arifin menghadiri kegiatan Anugerah Tinarbuka di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Rabu (17/5/2023).

Pencapaian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjaid momentum agar PPID di seluruh Badan Publik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan optimalisasi layanan informasi publik.



**4). Menghadiri Agenda Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.**

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta diwakili Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan Wakil Ketua Luqman Hakim Arifin menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Balai Raya Semarak Bengkulu, pada Kamis ( 25/5/2023).



**5). Menggelar Focus Group Discussion ( FGD) Optimalisasi E Money.**

Optimalisasi monitoring dan evaluasi ( E- money) Badan Publik DKI Jakarta sebagai momentum transformasi layanan informasi publik dari tahun ke tahun harus lebih meningkat.

Monev setiap tahunnya digelar Komisi Informasi DKI Jakarta bertujuan menilai sejauh mana Badan Publik menjalankan kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat membuka Focus Gorup Discussion(FGD) Optimalisasi E-monev keterbukaan informasi publik yang digelar Komisi Informasi DKI di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang Jakarta Pusat,pada Senin(29/5/2023).

Ia menjelaskan, Monev tahun ini harus ditingkatkan dari sisi teknis dan indikator penilaian bisa lebih cermat, tepat dan 'confident' sebagaimana mestinya.

Komisi Informasi DKI Jakarta sebagai lembaga independen yang lahir dari UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik bertugas menjalankan amanat melaksanakan monev keterbukaan informasi di seluruh Badan Publik Provinsi DKI Jakarta.

"E-monev yang akan dilaksanakan KI DKI Jakarta tahun ini berharap lebih optimal, menilai lebih tepat dan confident", ujar Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat.

Hal senada disampaikan oleh Abdul Rahman Mamun selaku praktisi keterbukaan informasi publik juga Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2011-2013 bahwa Monev bukan sekedar tradisi atau ceremonial saja. Akan tetapi, memiliki impact keterbukaan informasi yang dirasakan Masyarakat Jakarta.

Abdul Rahman menambahkan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monev yaitu Komisi Informasi sebagai pelaksana perlu lebih 'progressive' mengikuti perubahan zaman. Kedua, Monev bagi Badan Publik sebagai raport komitmen sehingga memiliki perhatian dan mendorong layanan informasi berkualitas. Dan ketiga publik perlu diberikan ruang partisipasi dan kolaborasi menilai badan publik.



Sementara pada sesi kedua, aspek dan indikator monev dipaparkan Direktur PATTIRO Bejo Untung mengenai kualitas informasi perlu mencerminkan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Sehingga ada target pemenuhan informasi di DKI.tutur Bejo dalam kesempatan FGD.

Perlu diketahui, pelaksanaan monev KI DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi partisipasi badan publik. Tercatat di tahun 2022, dari 163 Badan Publik(BP) dengan pengembalian Self Assesment Quistionnaire (SAQ) 126 BP dari 16 Kategori meliputi seluruh Satuan Perangkat Kerja Dinas (SKPD), BUMD, RSUD, Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian,

Pengadilan, Kejaksaan), Partai Politik, Kecamatan, Kelurahan dan Sekolah (SMA/SMP ) wilayah Provinsi DKI Jakarta.

FGD berlangsung dua sesi dari pagi sampai sore dihadiri komisioner Harry Ara Hutabarat (ketua), Luqman Hakim Arifin (Ketua Bidang Kelembagaan), Agus Wijayanto Nugroho (Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), Aang Muhti Gozali (Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi), dengan pemateri Abdurrahman Ma'mun (Ketua KI Pusat periode 2011-2013), Bejo Untung (Direktur PATTIRO), jajaran sekretariat dan tenaga ahli KI DKI Jakarta.

#### **6) Menghadiri undangan Peresmian Program Studi Linguistik Terapan -Program Magister- Universitas Al-Azhar Indonesia.**

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin hadir dalam peresmian program studi linguistic terapan Program Magister Universitas Al Azhar Indonesia, pada Selasa (30/5/2023).



#### **7). Mengkoordinasikan Rapat Rutin Kelembagaan**

##### ➤ Rapat Bersama Lembaga

Agenda rapat Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, mengkoordinasikan kegiatan bersama yang akan dilaksanakan di bulan Mei bertempat di ruang rapat GMS, Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Rabu 3 Mei 2023.

Rapat dihadiri unsur internal pelaksana dan pimpinan KI DKI Jakarta diantaranya: Harry Ara Hutabarat SH.,M.H (Ketua), Nelvia Gustina, SP (Wakil Ketua), Agus Wijayanto Nugroho (Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), Luqman Hakim A (Ketua Bidang Kelembagaan ) dan Aang Muhti Gozali ( Ketua Bidang E.S.A), Sekretariat dan Tenaga Ahli.



**8) Meghadiri Agenda Simulasi Penggunaan Aplikasi E-Money yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.**

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dan Tenaga Ahli Bidang Kelembgaan mewakili KI DKI Jakarta menghadiri simulasi penggunaan aplikasi E Money yang diselenggarakan KI Pusat melalui daring, pada Rabu (10/5/2023)

**2. Bobot Penilaian Evaluasi Money KIP 2023**  
Materi Money KIP 2023 meliputi penilaian terhadap aspek-aspek standar layanan informasi sebagai berikut:

ASPEK PENILAIAN	PARAMETER	BOBOT NILAI
1 KUALITAS INFORMASI	1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala	50%
	2. Informasi dicekalkan yang habis masa pengecualian	
	3. Daftar Informasi Publik	
2 SARANA dan PRASARANA	1. Elektronik dan non elektronik	50%
	2. Pelayanan Informasi	
3 JENIS INFORMASI	1. Tersedia Seflon Saat	35%
	2. Informasi dicekalkan	
4 KOMITMEN ORGANISASI	1. Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur	35%
	2. Pelaksanaan tugas Atasan PPID	
	3. Pelaksanaan tugas PPID Utama	
	4. Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi	
	5. Kepatuhan menjalankan keputusan Komisi Informasi	
5 DIGITALISASI	1. Aplikasi-aplikasi teknologi informasi berisikan keterbukaan informasi	35%
	2. Penyediaan platform dalam Play Store	
	3. Aktifitas media sosial	

➤ Rapat Pleno Komisioner.

Agenda: internal kelembagaan KI Provinsi DKI Jakarta periode 2023 – 2024.

Dihadiri : Harry Ara Hutabarat (Ketua KIP DKI Jakarta), Nelvia Gustina (Wakil Ketua), Aang Muhdi Gozali (Ketua Bidang ESA), Luqman Hakim Arifin (Ketua Bidang Kelembagaan), Agus Wijayanto Nugroho (Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), pada Senin 29 Mei 2023.



➤ Rapat Mingguan dengan Bid. Kelembagaan dan IT Support.



*Rapat rutin bidang kelembagaan hadir Ketua Bidang Kelembagaan Luqman Hakim Arifin, dan Tenga Ahli pada, Jumat 12 Mei 2023.*



*Rapat rutin bidang kelembagaan hadir Ketua Bidang Kelembagaan Luqman Hakim Arifin, dan Tenga Ahli pada, Selasa 16 Mei 2023.*

#### ❖ **Administrasi Kearsipan Kelembagaan Komisi Informasi DKI Jakarta.**

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip sangat berharga perlu dipelihara dan dilestarikan. Untuk itu perlu dikelola dengan baik dalam sebuah kerangka sistem yang benar.

### **BAB. III PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta selama Mei Tahun 2023, kami susun sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta amanah konstitusi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga khususnya dan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada umumnya.

# LAMPIRAN

## INFOGRAFIS

### ❖ Hari Buruh Nasional



### ❖ Hari Buku Nasional



❖ Hari Kenaikan Isa Al Masih



❖ Puncak Perayaan Tinarbuka 2023



❖ Anugerah Tinarbuka



❖ Hari Kebangkitan Nasional

